



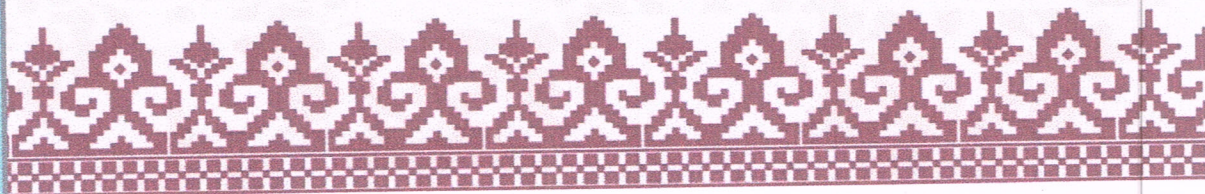
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**



**-RENSTRA-**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2016-2021**



## KATA PENGANTAR

Transportasi sebagai urat nadi, sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tata Kerja Unit di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi pembangunan yang menjadi suatu rencana kerja, merupakan strategi pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, dan untuk diketahui strategi standar pelayanan bersifat dinamis sehingga secara berkala dapat dilakukan evaluasi oleh pemerintah, guna untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.

Secara umum RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 -2021 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Secara rinci RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016 -2021 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun

waktu 2016-2021. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan dan Pemadu Moda, Bidang Kepelabuhan, dan Bidang Pelayaran, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2016-2021 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS**



**DJOKO EDY IMHAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680329 199002 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	18
2.2.2 Asset / Modal.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>26</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Telaahan Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis .....	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	39
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>34</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan .....	39
5.1.1 Strategi Dinas Perhubungan .....	43
5.1.2 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan .....	44
5.2 Pernyataan Visi Dinas Perhubungan .....	45
5.2.1 Pernyataan Misi Dinas Perhubungan .....	46
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>48</b>
Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan Pagu Indikatif.	

<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>53</b>
Pada bagian ini disajikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.	
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu.....	23
Tabel.2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu. ....	24
Tabel.4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah. ....	40
Tabel.6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu. ....	49
Tabel.7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD . ....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah, memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*.

Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah

dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi dengan penjelasan sebagai berikut :

**MODEL NEGERI** : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

**MAJU** : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

**MAKMUR** : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama** : *Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.*

**Misi Kedua** : *Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.*



**Misi Ketiga :** *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.*

Dari 3 misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah misi ke 3 (tiga) yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang perhubungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode lima tahun ke depan;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;

- d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat

Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRA DAN KEGIATAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
  - e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
  - f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

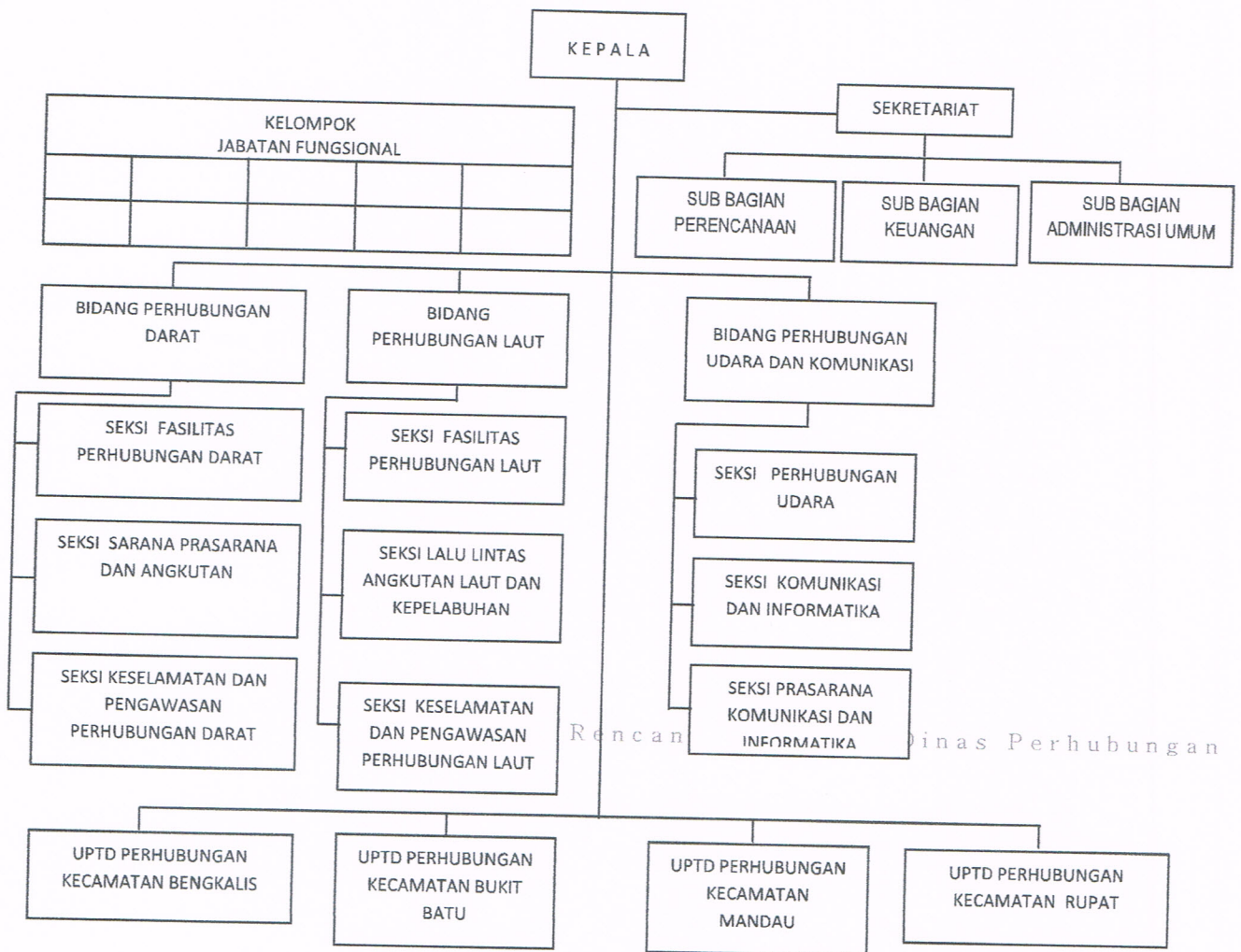
- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
  - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
  - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi, UPTD, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a) Kepala Dinas.
  - b) Sekretariat, terdiri dari :
    - (a) Sub. Bagian Perencanaan Program;
    - (b) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - (c) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
    - (a) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas;
    - (b) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
    - (c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
  - d) Bidang Angkutan dan Pemasu Moda, terdiri dari :
    - (a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
    - (b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
    - (c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
  - e) Bidang Kepelabuhanan, terdiri dari :
    - (a) Seksi Pembangunan Pelabuhan;
    - (b) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; Dinas Perhubungan
    - (c) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
  - f) Bidang Pelayaran, terdiri dari :
    - (a) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
    - (b) Seksi Keselamatan Pelayaran;
    - (c) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - h) Kelompok Jabatan Fungsional.



**Struktur Organisasi Lama**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Kab.Bengkalis  
 Nomor : 13 Tahun 2008

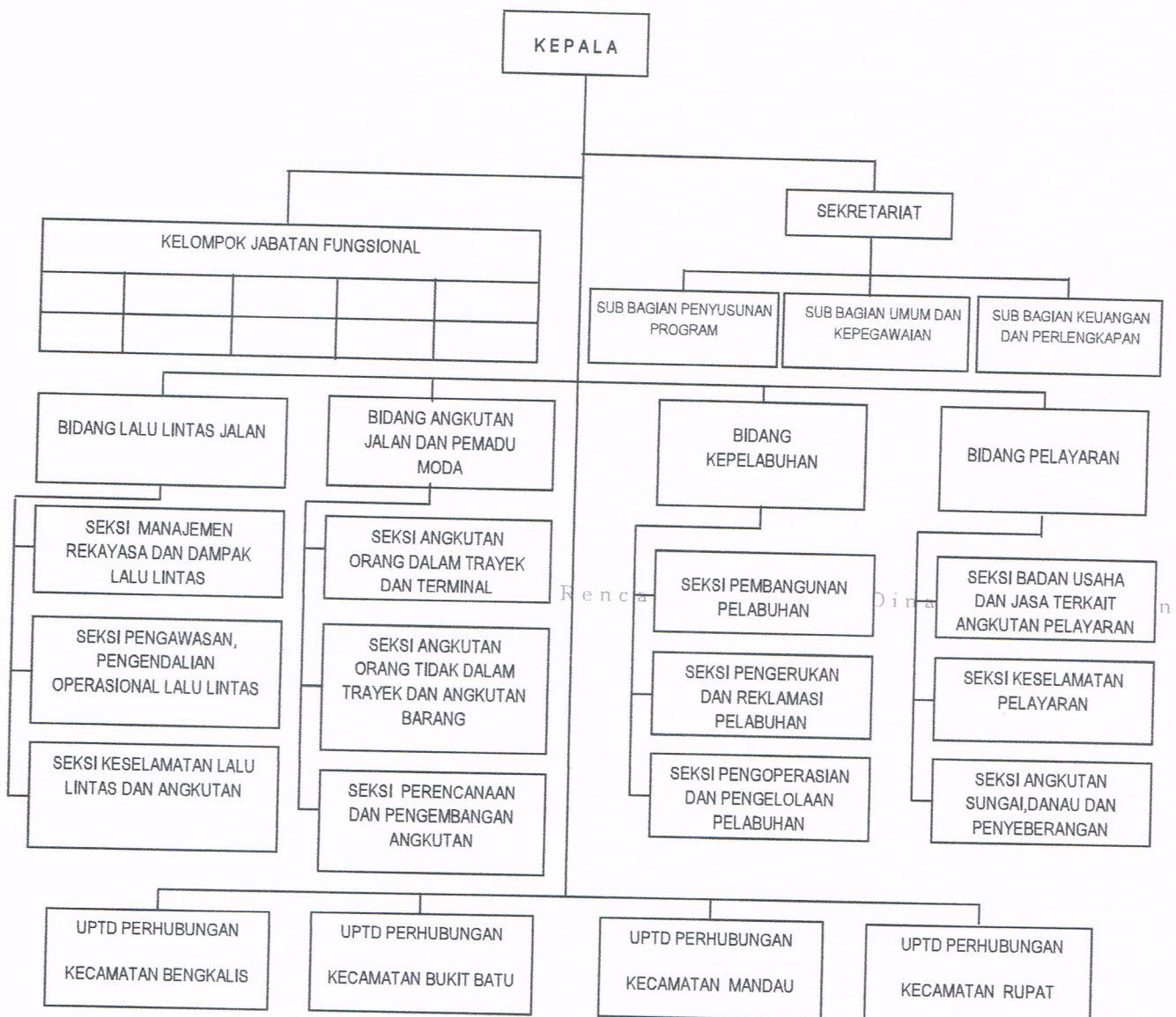
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**



**Struktur Organisasi Baru  
Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.**

Lampiran : Peraturan Daerah Kab.Bengkalis  
 Nomor : 50 Tahun 2016  
 Tanggal : 30 November 2016

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BENGKALIS**



Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat Struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan.  
Kepala menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - b) Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - c) Pelaksanaan koordinasi dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
  - d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perhubungan;
  - e) Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perhubungan;
  - f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dibidang perhubungan;
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.  
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program anggaran dibidang perhubungan;
  - b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - c) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
  - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program  
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Sub Keuangan dan Perlengkapan  
Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang rekayasa dan dampak lalu lintas, operasional jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :
- a) Penetapan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan bidang manajemen rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan;
  - b) Penetapan rumusan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
  - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengelolaan sarana transportasi lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :

- a) Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang manajemen lalu lintas jalan.

b) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas.

c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang keselamatan lalu lintas dan angkutan.

4) Bidang Angkutan dan Pemandu Moda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang angkutan orang dalam trayek dan terminal, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang dan perencanaan serta pengembangan angkutan;

Bidang Angkutan dan Pemandu Moda menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan orang dan barang, serta pepadu moda dan pengembangan;
- b) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengembangan angkutan;<sup>15</sup> | Rencana Strategis Dinas Perhubungan
- c) Penyusunan rencana teknis jaringan Trayek angkutan dalam Kabupaten;
- d) Pengembangan angkutan berbasis teknologi informasi manajemen'
- e) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang dalam trayek dan angkutan massal terintegrasi;
- f) Penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang tidak dalam trayek dan angkutan khusus;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

- a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan orang dalam trayek dan terminal.

b) Seksi Angkutan Orang tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

c) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang perencanaan dan pengembangan angkutan.

5) Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang perhubungan;

Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;

c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Angkutan dan Pemandu Moda, terdiri dari :

a) Seksi Pembangunan Pelabuhan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pembangunan Pelabuhan.

- b) Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan.
- c) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- 6) Bidang Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang angkutan pelayaran.  
Bidang Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi di bidang Pelayaran, terdiri dari :

- Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran.

b) Seksi Keselamatan Pelayaran.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang keselamatan pelayaran.

c) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberidan pendamping, pemantauan, dan evaluasi dibidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas, meliputi : operasional terminal, operasional penyebrangan, dan operasional pelabuhan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 29 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II/b = 1 jabatan, Administrator/Eselon III/a = 1 jabatan, Administrator/Eselon III/b= 4 jabatan, Pengawas/Eselon IV/a = 19 jabatan, dan Pengawas/Eselon IV/b = 4 jabatan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis per tanggal 31 Desember 2016 berjumlah 110 orang. sebagaimana disajikan pada tabel tabel berikut :



**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2016**

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	7 Orang
2.	Golongan II	62 Orang
3.	Golongan III	33 Orang
4.	Golongan IV	8 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>110 Orang</b>

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	6 Orang
2.	Strata 1	21 Orang
3.	Sarjana Muda / Diploma 3	5 Orang
4.	Diploma 2	1 Orang
5.	SLTA / Sederajat	70 Orang
6.	SLTP / Sederajat	3 Orang
7.	SD	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>110 Orang</b>

19 | Rencana Strategis Dinas Perhubungan

**Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2016**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	110 Orang
2.	Tenaga Kerja Sukarela	178 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>288 Orang</b>

**Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2016**

No	Kualifikasi	Jumlah
1.	PPNS	-
2.	Pengelolaan Terminal	-
3.	Pengujian Kendaraan Bermotor	3 Orang
4.	Analisis Dampak Lalu Lintas	-
5.	Manajemen Lalu Lintas	-
6.	Audit Keselamatan Lalu Lintas	-
7.	Surveyor	-
8.	Perencanaan Transportasi	-
9.	Orientasi LLAJ	-
10.	Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	-
<b>Jumlah</b>		<b>3 Orang</b>

### 2.2.2 Asset / Modal

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.5 Asset Dinas Tahun 2016**

No	Asset	Jumlah Satuan
1	Perlengkapan Barang Bergerak	
	1. Roda 2	28
	2. Roda 4	17
	3. Truk	1
	4. Bus	7
	5. Mobil Derek	1
	6. Kendaraan bermotor khusus lain-lain / KIR	1
2	Perlengkapan Barang Tidak Bergerak	
	1. Tanah	11 lokasi = Bengkalis, Bukit Batu, Duri

3	Perlengkapan Barang Elektronik 1. Pesawat Telepon 2. Radio Komunikasi 3. Televisi 4. Komputer Portable 5. Laptop/notebook 6. Printer 7. Sound System	5 buah 6 buah 25 buah 17 buah 22 buah 22 buah 3 buah
4	Perlengkapan Kantor 1. Meja 2. Kursi	92 Meja 74 Kursi
5	Perlengkapan Alat Pengecatan Jalan : 1. Mesin Marka Jalan 2. Alat Pemadam Kebakaran	6 buah
6	Perlengkapan Alat Uji : 1. Car Lift / Fit Lift 2. Wheel Suspension Tester 3. Pit Axleply Detector 4. Brake Slip Tester 5. Axle Load Meter 6. Co / Ho Tester 7. Diesel Smoke Tester 8. Air Compresor 9. Side Slip Tester 10. Speedo Meter Tester 11. Noise Tester 12. Tool Box 13. Head Light Tester 14. Diesel Generator set 15. Sound Level Tester 16. Light Meter	
7	Perlengkapan Kantor lainnya: 1. Brankas 2. Pompa Air	6 buah 2 buah
8	Perlengkapan Lalu Lintas : 1. Rambu Jalan 2. Cermin tikungan 3. Guard Rail / pagar pengaman 4. WaterBarrier 5. APILL 6. Warning light 7. Pelican Crossing	3029 buah 18 buah 11 buah Meter Buah Buah

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat delapan indikator kinerja sesuai dengan SPM, tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

**Pelayanan Dinas Perhubungan** mengelola pungutan 5 jenis retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Parkir Umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
5. Retribusi Ijin Trayek.

Dari hasil biaya pemungutan retribusi jasa umum dari rencana target Rp.400.000.000,- realisasi keuangan Rp. 404.400.000,- atau 101.1%, retribusi pengujian kendaraan bermotor rencana target Rp. 1.900.000.000,- realisasi keuangan Rp.1.456.310.000,- atau 76,65%, retribusi Terminal dari rencana target Rp.75.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 21.698.000,- atau 28,93%, retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp. 5.100.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.081.839.164,- atau 80,04%, retribusi izin trayek rencana target Rp.12.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.865.000,- atau 46,92%. Dari hasil realisasi target pendapatan asli daerah dimana terdapat peningkatan dari penerimaan PAD dari jasa umum sebesar Rp.404.400.000,- dari target awal Rp.400.000.000,-.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Bengkalis**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (2)	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target indikator lainnya (5)	Target Renstra tahun						Realisasi capaian tahun						Rasio capaian tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.	Terlaksananya keselamatan transportasi	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	35%	58%	75%	90%	50%	87%	96%	93%	90%	
2.	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor dan Pelabuhan.	30%	55%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	15%	40%	64%	89%	91%	50%	72%	91%	98%	91%		
3.	Tersedianya pelabuhan-pelabuhan rakyat dan nelayan serta terminal	25	30	35	40	45	40	45	41	34	47	40	40	40	164%	113,3%	134,2%	100%	88,85		
4.	Terlaksananya kelancaran transportasi	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	20%	37%	59%	75%	90%	100%	100%	92%	98%	93%	90%		
5.	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	38%	58%	76%	90%	100%	95%	96%	95%	90%	100%			
6.	Tersedianya tempat pengujian kendaraan bermotor dan peralatan uji kendaraan bermotor	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66		
7.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana dibidang perhubungan	20%	40%	60%	100%	100%	100%	21%	38%	60%	80%	100%	100%	105%	95%	100%	80%	100%	100%		
8.	Terlaksananya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat	80%	90%	95%	100%	100%	100%	81%	89%	93%	100%	100%	101%	98%	98%	97%	100%	100%	100%		
9.	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM aparatur perhubungan	30%	55%	70%	90%	100%	100%	29%	50%	65%	85%	98%	96%	90%	92%	94%	98%	98%			

Tabel 2.2  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Bengkulu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun										Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan						
	2011		2012		2013		2014		2015		2011		2012		2013		2014		2015		1	2	3	4	5	(17)	Realisasi (18)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.609.098.215,00	6.039.930.720,00	8.536.069.345,00	7.661.544.280,00	8.364.483.931,00	9.334.091.363,00	4.344.437.849,00	5.790.558.155,00	5.618.302.085,00	6.147.783.948,00	74,03	71,93	67,82	73,34	73,30	8.642.625.296,20	6.247.154.560,00										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.590.552.790,00	4.315.176.487,00	7.717.744.431,00	13.209.119.720,00	9.903.595.450,00	5.510.078.866,00	3.482.240.955,00	5.740.064.410,00	10.721.207.760,00	7.017.580.349,00	83,61	80,70	74,37	81,17	70,86	8.347.237.775,60	6.494.234.468,00										
Program Peningkatan disiplin aparatur	124.100.000,00	560.000.000,00	623.902.750,00	13.209.119.720,00		121.237.000,00	267.498.400,00	519.975.000,00	10.721.207.760,00		97,69	47,77	83,34	81,17		3.629.280.617,50	2.907.479.540,00										
Program Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	278.480.000,00	72.549.554,00	550.000.000,00	150.000.000,00	571.000.000,00	94.700.200,00	20.019.554,00	284.847.000,00	87.785.300,00	324.849.800,00	34,01	27,59	51,79	58,52	62,35	314.405.910,80	162.440.370,80										
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.385.959.450,00	4.984.896.467,00	5.490.111.185,00	4.335.243.800,00	7.486.497.770,00	2.571.451.750,00	406.140.375,00	2.711.473.285,00	3.021.593.600,00	6.223.498.256,00	75,94	8,15	49,39	69,70	83,13	5.136.542.134,40	2.986.831.453,20										
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.042.187.500,00	1.351.651.340,00	13.102.686.700,00	77.529.516.101,00	48.238.208.585,00	852.937.500,00	964.012.500,00	10.176.788.113,00	49.482.695.846,00	32.712.700.810,00	81,84	71,32	77,68	63,82	67,81	29.252.849.985,20	18.838.227.033,80										
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	1.464.484.900,00	3.611.797.437,00	3.980.969.700,00	2.154.645.700,00	8.946.583.095,00	1.144.052.700,00	2.340.949.692,00	3.327.445.200,00	2.106.346.200,00	8.057.266.115,00	78,12	64,81	83,58	97,76	90,06	4.031.696.166,40	3.395.211.981,40										
	1.128.613.000,00	1.001.777.200,00	1.337.545.000,00	702.389.270,00	2.215.042.563,00	411.157.800,00	272.389.394,00	752.601.000,00	505.535.470,00	854.924.503,00	36,43	27,19	56,27	71,97	38,60	1.277.073.406,60	559.321.633,40										
Program Kerjasama Informasi dengan Mass media		1.001.777.200,00			1.420.540.000		272.389.394,00			442.865.000					31,18	1.211.158.600,00	357.627.197,00										
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi					543.701.000					400.336.000					73,63	543.701.000,00	400.336.000,00										
Pembangunan sistem pendataan, umrah, Program perencanaan Pembangunan Daerah		1.067.990.337,00		1.529.943.000,00	1.596.937.680,00		5.965.337,00		1.087.941.400,00			0,56			71,11	1.388.296.339,00	364.635.579,00										
					48.712.700,00											48.712.700,00											

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pesatnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas terhadap penyediaan sarana transportasi.

Dengan kondisi dan perkembangan transportasi pada saat ini Dinas Perhubungan perlu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan serta mengembangkan sarana prasarana transportasi, antara lain :

- Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan berbasis IT (ITS-ATCS).
- Meningkatkan kondisi kendaraan angkutan umum yang lebih baik dan nyaman.
- Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang terjadwal dan terintegrasi.
- Meningkatkan Pengelolaan manajemen perparkiran di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir menjadi lebih baik.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi.
- Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk ditindaklanjuti mengingat saat ini Kabupaten Bengkalis telah meraih WTC.

Selain hal tersebut tidak terlepas dari pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan jauh lebih baik dari tahun ke tahun.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengalami berbagai macam kendala dihadapi yang mendapat perhatian adalah :

- 1) Masih adanya infrastruktur yang belum memadai meliputi sarana dan prasarana perhubungan.
- 2) Konflik ruang yang ditandai dengan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan untuk sarana transportasi dengan aturan penggunaannya.
- 3) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat untuk jasa perhubungan.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta ketidak pahaman masyarakat yang membawa akibat belum optimalnya pembangunan sektor-sektor pembangunan bidang Perhubungan.

Dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi permasalahan ke depan melalui program lima tahunan sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran tahunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*), dan tergantung kepada semua sektor terkait dalam penyelenggaraan pembangunan dengan mengakomodasikan aspirasi reformasi yang berkembang di masyarakat, mencakup bidang Lalu Lintas Jalan, bidang Angkutan Jalan dan



Pemadu Moda, bidang kepelabuhan, dan Bidang Pelayaran.

Factor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
Internal	Eksternal	
1. Jumlah SDM 2. Sarana dan prasarana penunjang operasional 3. Sistem Informasi teknologi di bidang transportasi (ATCS)	1. Regulasi di Bidang Transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Kesiediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat 4. Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 5. Perkembangan teknologi informasi di sector transportasi pada era globalisasi 6. Peran serta swasta dan masyarakat	1. Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas 2. Kepemilikan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum 3. Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi harapan.

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 terpilih adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi dengan penjelasan sebagai berikut :

**MODEL NEGERI** : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.

**MAJU** : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi priode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.

**MAKMUR** : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama** : *Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.*

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan baik melalui pendekatan sektoral maupun pendekatan kewilayahan (*spatial strength*) dengan memperhatikan kekhususan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

**Misi Kedua** : *Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.*

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

**Misi Ketiga** : *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.*

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
7. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
8. Program pengembangan perumahan
9. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

## (2) Gerbang Laksamana

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil. Fokus gerbang ini kawasan industri wisata religius, pelabuhan eksporimpor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan rakyat modern yang pro rakyat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Laksamana** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
6. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Selain program prioritas yang akan dilaksanakan SOPD, terdapat juga program pendukung pencapaian keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Laksamana** yaitu:

1. Program Penataan Keindahan Kota
2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

6. Program Pendidikan Anak Usia Dini
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
13. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

### (3) Gerbang Permata

Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Mandau, Talang Muandau, Pinggir dan Bathin Solapan. Fokus gerbang sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, perburuhan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Permata** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

1. Program Penataan Struktur Industri
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Selain program prioritas yang akan dilaksanakan SOPD, terdapat juga program pendukung pencapaian keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Permata** yaitu:

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6. Program pengembangan nilai budaya
7. Program Penataan Keindahan Kota
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
11. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
12. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
13. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
14. Program pengembangan perumahan
15. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
17. Program Penataan Administrasi Kependudukan

#### (4) Gerbang Pesisir

Wilayah ini terdiri Kecamatan Rupal dan Kecamatan Rupal Utara. Fokus gerbang ini menjadikan Pulau Rumat Utara sebagai pusat pengembangan pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Pesisir** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6. Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
8. Program Pengembangan Nilai Budaya
9. Program Penataan Keindahan Kota

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada **Gerbang Pesisir** ini, maka ada program prioritas untuk dilaksanakan oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yaitu:

1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4. Program Pendidikan Menengah
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10. Program Pembangunan turap/talud/brojong
11. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
12. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
13. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
14. Program pengembangan perumahan
15. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang perhubungan adalah misi ke 3 dan khususnya dalam *Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas perhubungan transportasi dan logistik daerah termasuk di wilayah gerbang pembangunan negeri.*

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana Perhubungan
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 adalah :

1. meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
2. meningkatnya masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi back log dan bottle neck kapasitas infrastruktur transportasi;
4. peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
5. terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang efisien.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2020 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2020 berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2016. Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rekayasa Lalin;

2. Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/pengembangan simpul transportasi jalan;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk RENCANA SRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2015 – 2020 system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan;
4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat).

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, maka mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Bengkalis, maka rencana pengembangan transportasi Kabupaten Bengkalis meliputi, yaitu:

Sistem jaringan transportasi darat meliputi : Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.

Salah satu program dalam renstra kementerian perhubungan Republik Indonesia adalah mengenai keselamatan transportasi yang mana dalam hal ini pun ikut didukung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan salah satu programnya yaitu pengendalian dan pengamanan lalu lintas Sedangkan untuk renstra Dinas Perhubungan ada kesamaan dalam upaya mengatasi kemacetan dengan mengedepankan sarana angkutan umum.



### 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bengkalis dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Berikut ini adalah isu-isu global, nasional dan kewilayahan pada pembangunan jangka menengah Indonesia 2015 - 2019 berdasarkan hasil penelaahan terhadap RPJMN tahun 2015 - 2019 yang dapat mempengaruhi langsung dan tidak langsung terhadap eksistensi dan pembangunan daerah ke depan.

#### Isu-isu Strategis Global

Dari Isu-isu Global Terkini Secara khusus tantangan daerah dalam menghadapi MEA salah satu dari 5 (lima) strategi yang menjadi peran penting dalam menghadapi MEA dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 yakni :

**Strategi 4 :** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia, (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP).

#### Isu-isu Strategis Nasional

Isu-isu pokok strategis nasional berangkat dari arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015 - 2019 sebagai berikut :

##### **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.**

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya

dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

### **Isu-isu Kewilayahan**

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah di Pulau Sumatra, maka Isu - isu kewilayahan yang harus diperhatikan meliputi Prasarana, Sarana dan Penataan Ruang yang difokuskan pada persoalan terbatasnya konektivitas (interkoneksi) wilayah terutama pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terpencil/dan atau terbelakang.

### **Isu-isu Strategis Provinsi Riau 2014 - 2019**

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 :

Pengembangan Infrastruktur dan integrasi jaringan transportasi, yang berfokus kepada : daya dukung jaringan transportasi wilayah dan konektivitas jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan *RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021* Provinsi serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara yang memerlukan sinkronisasi sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang.

### **Penetapan Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021**

Berdasarkan analisa terhadap indikator capaian pembangunan daerah, kemudian mencermati rencana tata ruang dan wilayah serta isu-isu strategis pada RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, maka dapat disusun rancangan pokok-pokok isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2016-2021 khusus di bidang perhubungan sebagai berikut :

Pengelolaan perhubungan darat dan laut masih terkendala kesiapan prasarana dan sarana perhubungan yang memadai sehingga tata logistik dan mobilitas orang masih menjadi kendala yang harus segera diselesaikan termasuk perhubungan penyeberangan antara Kota Dumai ke Pulau Rupat yang belum optimal pengelolaannya oleh Provinsi Riau sehingga berdampak kepada pengembangan kerjasama antara Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Kedisiplinan pengguna moda transportasi juga perlu

mendapatkan pembinaan kesadaran untuk dapat menurunkan angka kecelakaan dan angka pelanggaran lalu lintas khususnya di jalan raya.

Dari aspek pelayanan umum urusan wajib Perhubungan masih memiliki sejumlah permasalahan kondisi kinerja di akhir tahun 2015 sebagai berikut :

- (a) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan.
- (b) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan rambu-rambu jalan khususnya pada jalan perlintasan dan pusat perkotaan.
- (c) Masih tingginya *overloading* angkutan barang.
- (d) Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.
- (e) Tertundanya rencana pembangunan lapangan terbang di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
- (f) Belum adanya keserasian kebijakan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat tentang pemanfaatan bersama lapangan udara Sei-Selari Bukit Batu dan penataan jalur perhubungan laut yang melintasi Selat Selari dan Selat Bengkalis.
- (g) Tertundanya rencana pembangunan pelabuhan laut di Bukit Batu

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 (RPJMD), Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berada berada pada Misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas untuk Kesejahteraan Rakyat**, dengan **tujuan Misi 3** Meningkatkan Aksesibilitas Daerah dan **Sasaran Misi 3** Meningkatnya Kualitas Infrastruktur antar Wilayah.

Tujuan, sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dapat di jelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..					
				1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021
1.	Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum	(3) Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	(4) Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	n/a	n/a	n/a	20	30	40
2	Meningkatkan Akses Transportasi	Meningkatnya Akses Transportasi antar Daerah	Persentase desa yang terlayani Angkutan Umum layak jalan/layar	29	36	45	50	56	80
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang terpadu antar Daerah	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	86	88	90	92	94	96
			Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	n/a	n/a	n/a	2	4	5
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	0	65	70	80	82	85
4.	Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	B	B	BB	BB
			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK.	100	100	100	100	100	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis**

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk melaksanakan strategi yaitu penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perhubungan dengan arah kebijakan menyiapkan prasarana pelabuhan /terminal yang sesuai dengan kebutuhan perhubungan wilayah dan melakukan keserasian pengelolaan transportasi sungai dan antar pulau dengan berbagai pihak. Sehubungan dengan penjelasan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis merencanakan strategi dan kebijakan untuk lima tahun kedepan dengan uraian seperti pada tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Sistem Transportasi Kabupaten Bengkalis yang Handal dalam mendukung Sistem Transportasi Wilayah dan Nasional</b>			
<b>MISI I : Mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan terkendali.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan keselamatan Transportasi Umum	Meningkatnya keselamatan lalu lintas transportasi darat dan laut.	Penataan dan pengaturan Lalu Lintas	Mewujudkan kondisi lalu lintas yang terkendali, aman dan lancar
<b>MISI II : Mewujudkan sarana angkutan umum Pedesaan dan Perkotaan</b>			
Meningkatkan akses Transportasi antar Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana Transportasi yang terpadu antar daerah	Penataan Transportasi angkutan orang	Meningkatkan dan menyediakan angkutan orang
<b>MISI III : Mewujudkan kualitas pelayanan Perhubungan</b>			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Menyediakan sarana dan fasilitas pendukung pelayanan Transportasi
<b>MISI IV : Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik.</b>			
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja	Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik.	Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel

### 5.1.1 Strategi Dinas Perhubungan

Strategi perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas masyarakat di perkotaan maupun perdesaan di seluruh pelosok Kabupaten Bengkalis. strategi penataan dan pengaturan Lalu Lintas keselamatan melalui manajemen aman, sistem aman, masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan aman (*Safer Management; Safer System; Safer People; Safer Vehicle dan Safer Road*).

Rumusan Strategi Perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Strategi Penataan dan Pengaturan Lalu Lintas.

Strategi Penataan dan pengaturan lintas diarahkan untuk melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas melalui pembangunan system pengendalian dan operasi, penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kerangka mewujudkan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas angkutan jalan.

#### 2. Strategi Penataan Transportasi Angkutan Orang.

Strategi Penataan Transportasi angkutan orang diarahkan untuk melakukan penyusunan rencana teknis jaringan trayek angkutan orang dalam Kabupaten, penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang dalam trayek dan angkutan massal terintegrasi, penyelenggaraan dan pengelolaan angkutan penumpang tidak dalam trayek dan angkutan khusus serta pengembangan angkutan berbasis teknologi informasi manajemen dalam kerangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

#### 3. Strategi Peningkatan dan Penataan Jaringan Transportasi

Strategi Peningkatan dan penataan jaringan transportasi diarahkan untuk melakukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana yang mendukung kemudahan pergerakan transportasi serta menata simpul-simpul penghubung transportasi antar wilayah, sehingga perpindahan antar moda transportasi dapat dibuat menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, lebih baik dan lebih nyaman maka integrasi dan fleksibilitas dari jaringan secara keseluruhan akan berkembang dengan pesat.

#### 4. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi

Strategi Peningkatan kualitas pelayanan transportasi diarahkan untuk



menyediakan sarana maupun fasilitas perhubungan yang mendukung mobilitas/pergerakan masyarakat pengguna jasa transportasi yaitu dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi melalui peningkatan profesionalisme manajemen, operasi, dan efisiensi; meningkatkan kelancaran, ketepatan jadwal perjalanan, kecepatan, frekuensi, serta penyediaan fasilitas alih moda yang memadai; dan meremajakan armada transportasi baik armada darat maupun laut. Kebijakan lainnya ialah meningkatkan manajemen pengurusan perjalanan; mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan transportasi; dan meningkatkan mutu keselamatan pelayaran melalui pembangunan fasilitas navigasi, kesyahbandaran, penjagaan laut dan pantai serta pemeliharaan alur pelayaran.

5. Strategi Peningkatan Tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik.

Strategi Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik diarahkan untuk memperbaiki kualitas manajemen pengelolaan kegiatan, pengelolaan anggaran, maupun manajemen kepegawaian dilingkup Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis sehingga di peroleh hasil akhir yang baik, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

### 5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum dalam penyelenggaraan dan pembangunan perhubungan yang ditetapkan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain meliputi:

1. Mewujudkan kondisi lalu lintas yang terkendali , aman dan lancar.

Meningkatkan pengaturan kondisi lalu lintas melalui manajemen aman, sistem aman, masyarakat aman, kendaraan aman, dan jalan aman serta mengembangkan sistem manajemen lalu lintas yang berbasis teknologi yaitu, Area Traffic Control System (ATCS) yang terintegrasi sehingga arus lalu lintas yang sering terjadi rawan kemacetan dan kecelakaan dapat di atasi dengan cepat.

2. Meningkatkan dan menyediakan angkutan orang.

Meningkatkan penyediaan sarana angkutan orang melalui upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan juga moda transportasi yang mendukung kemudahann masyarakat dalam melakukan pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

3. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi yang belum terjangkau serta daerah yang potensial, dalam hal ini diupayakan untuk mengembangkan sisten jaringan transportasi yang terintegrasi antara moda trasnportasi laut dengan darat serta membuka akses wilayah yang belum tersentuh sarana transportasi.
4. Menyediakan sarana dan fasilitas pendukung pelayanan transportasi. Peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan/transportasi laut, darat, sungai, penyeberangan, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi melalui perbaikan, perluasan dan penambahan sarana dan prasarana transportasi dengan fasilitas pendukung lainnya.
5. Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel. Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel dengan menerapkan sistem pengelolaan anggaran yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan serta berupaya meningkatkan kualitas aparatur dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

## 5.2 Pernyataan Visi Dinas

Visi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dirumuskan dan diarahkan untuk menunjang terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu berperan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut:

### **Visi**

**” Terwujudnya Sistem Transportasi Kabupaten Bengkalis yang handal dalam mendukung Sistem Transportasi wilayah dan Nasional”**

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1) Keselamatan dan kelancaran Transportasi.

Peningkatan keselamatan dan kelancaran sistem transportasi serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang menggambarkan pergerakan transportasi yang handal, yaitu kondisi transportasi dimana kebutuhan pergerakan, baik itu pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau dan efektif, sehingga kata “handal” dalam Visi dapat diartikan sebagai layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok baik itu di Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi dan Nasional.

### 2) Menunjang Pembangunan Daerah.

Artinya dengan sistem transportasi yang handal diharapkan dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Bengkalis yang sangat menunjang dalam pembangunan didaerah terutama untuk mensuplay bahan-bahan kebutuhan pokok dan bahan material untuk pembangunan disemua bidang sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolir.

### 3) Peningkatan Pendapatan Daerah dibidang Dishub

Dengan berkembangnya iklim usaha yang kondusif berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah dari sektor perhubungan juga meningkat.

## 5.2.1 Pernyataan Misi Dinas

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, serta mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang, maka disusun Pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kedepan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan terkendali.  
Dalam upaya mewujudkan kondisi lalu lintas yang terkendali, aman dan lancar, sehingga dapat mengurai arus lalu lintas yang padat pada ruas-jalan di daerah-darerah yang berada di kabupaten Bengkalis.
  
- 2) Mewujudkan sarana angkutan umum Pedesaan dan Perkotaan  
Dalam upaya mewujudkan sarana angkutan umum guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, sebagai salah satu sarana transportasi angkutan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
  
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan Perhubungan  
Dalam hal mewujudkan kualitas Pelayanan yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, berupaya mewujudkan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai visi misi Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten. Maka Dinas Perhubungan berupaya membangun sarana dan prasarana serta fasilitas yang menunjang kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas /perpindahan tempat serta mempermudah masyarakat memperoleh akses Transportasi melalui birokrasi yang efektif dan efisien.
  
- 4) Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik.  
Mewujudkan tata kelola manajemen yang baik, efektif dan efisien merupakan salah satu misi Dinas Perhubungan dalam upaya memperoleh predikat yang baik serta mendukung kinerja Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan SDM Aparatur yang handal serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan diperoleh hasil kinerja yang baik.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, terdapat sebanyak 10 (sepuluh) Program yang terdiri dari 6 (enam) Program pada bidang Perhubungan, 5 (lima) program pada Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dan 4 (empat) Program pada Non urusan. Sementara untuk rincian kegiatan dan pagu dana Indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Korangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																			
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																						
						Target	Dalam Jutaan (Rp)	Target	Dalam Jutaan (Rp)	Target	Dalam Jutaan (Rp)	Target	Dalam Jutaan (Rp)	Target	Dalam Jutaan (Rp)	Target	Dalam Jutaan (Rp)																					
Meningkatkan keselamatan transportasi umum	(2)	(3)	<p>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan Angkutan.</li> <li>Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</li> <li>Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang di Jalan Raya</li> <li>Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mud/ awak kendaraan angkutan umum teladan.</li> <li>Temu wicara pengelolaan angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.</li> </ul> <p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.</li> <li>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan</li> <li>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Penyelenggaraan.</li> <li>Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan laut.</li> <li>Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAU Kabupaten Bengkalis.</li> <li>Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Angkutan Darat</li> </ul> <p>Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan rambu rambu lalu lintas.</li> <li>Pengadaan Mirirka Jalan</li> <li>Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan</li> <li>Pengadaan Alat Pemberi Isyarat lalu lintas</li> <li>Pengawasan dan Pembinaan di Bidang Lalu Lintas.</li> <li>Sosialisasi Keselamatan Berhulu Lintas.</li> <li>Sosialisasi/ Penulisan Kerteban Lalu Lintas dan angkutan</li> </ul>	<p>(5)</p> <p>Persentase Keselamatan Angkutan Darat</p> <p>Jumlah dilakukan Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan serta pengendalian angkutan darat dan angkutan laut pada hari-hari besar.</p> <p>Jumlah dilaksanakan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</p> <p>Jumlah dilakukan Sosialisasi dan Pembinaan Pengoperasian Angkutan Umum dan Barang di Jalan Raya</p> <p>Jumlah Peserta pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mud/ awak kendaraan angkutan umum teladan.</p> <p>Jumlah dilakukan Temu wicara pengelolaan angkutan umum.</p> <p>Persentase Keselamatan Angkutan Darat dan pelayaran Angkutan laut</p> <p>Jumlah Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi.</p> <p>Jumlah Terminal/Pelabuhan yang direhabilitasi</p> <p>Jumlah dilakukan perawatan Terminal/Pelabuhan Penyelenggaraan</p> <p>Jumlah prasarana dan fasilitas Perhubungan laut yang dipelihara.</p> <p>Jumlah dilakukannya perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAU</p> <p>Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dipelihara</p> <p>Persentase Keselamatan Angkutan Darat dan pelayaran Angkutan laut</p> <p>Jumlah pelaksanaan Pengadaan rambu rambu lalu lintas.</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Mirirka Jalan</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Alat Pemberi Isyarat lalu lintas.</p> <p>Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bidang lalu Lintas.</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Berhulu Lintas.</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Penulisan Kerteban lalu Lintas dan angkutan</p>	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																			
																				45%	-	60%	-	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-
																				3 kali	2.304	3 kali	2.500	3 kali	1.900	3 kali	1.810	3 kali	1.800	3 kali	1.810	3 kali	1.800	3 kali	1.790	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				4 kali	314	3 kali	364	4 kali	273	4 kali	250	4 kali	232	4 kali	250	4 kali	232	4 kali	220	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				0	0	0	0	4 kali	230	4 kali	215	4 kali	220	4 kali	215	4 kali	220	3 kali	195	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				30 Orang	180	30 Orang	160	50 Orang	120	40 Orang	136	40 Orang	125	40 Orang	136	40 Orang	125	40 Orang	133	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				1 kali	126	1 kali	130	1 kali	115	1 kali	102	1 kali	121	1 kali	102	1 kali	121	1 kali	100	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				45%	-	60%	-	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				3 Unit	346	3 Unit	550	3 Unit	300	3 Unit	300	3 Unit	210	3 Unit	300	3 Unit	210	3 Unit	200	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				9 Unit	2.400	4 Unit	1.680	6 Unit	1.600	5 Unit	1.510	4 Unit	1.520	5 Unit	1.510	4 Unit	1.520	5 Unit	1.410	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				1 Kegiatan	7.230	1 Tahun	700	1 Tahun	1.000	1 Tahun	750	1 Tahun	600	1 Tahun	750	1 Tahun	600	1 Tahun	750	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				0	0	0	0	3 Unit	673	2 Unit	550	2 Unit	480	2 Unit	550	2 Unit	480	2 Unit	400	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				0	0	0	0	1 Tahun	420	1 Tahun	500	1 Tahun	550	1 Tahun	500	1 Tahun	550	1 Tahun	500	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				0	0	0	0	2 Unit	400	2 Unit	420	2 Unit	500	2 Unit	420	2 Unit	500	3 Unit	550	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
																				45%	-	60%	-	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis	
63 Paket	5.690	19 Paket	2.710	4 Kegiatan	1.000	5 kegiatan	1.121	5 Kegiatan	1.200	4 Kegiatan	990	5 Kegiatan	1.200	4 Kegiatan	990	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	24 Paket	3.300	8 Kegiatan	1.690	9 Kegiatan	1.720	6 Kegiatan	1.420	5 Kegiatan	1.200	6 Kegiatan	1.420	5 Kegiatan	1.200	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	29 Paket	4.500	8 Kegiatan	2.130	7 Kegiatan	2.000	6 Kegiatan	1.890	5 Kegiatan	1.789	6 Kegiatan	1.890	5 Kegiatan	1.789	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	2 Kegiatan	480	3 Kegiatan	500	3 Kegiatan	480	3 Kegiatan	500	3 Kegiatan	480	3 Kegiatan	500	3 Kegiatan	510	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	0	0	0	0	3 kali	200	3 kali	250	3 kali	210	3 kali	250	3 kali	210	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	0	0	2 kali	50	3 kali	60	2 kali	60	2 kali	60	3 kali	60	2 kali	60	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					
0	0	0	0	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	100	Dinas Perhubungan	Kab. Bengkalis																					









## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada akhir periode. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setia tahun sehingga kondisi capaian kinerja yang diinginkan pada akhir rencana strategis dapat dicapai. Penyusunan indikator kinerja ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

**Tujuan** : Meningkatkan Kapasitas Penyediaan Prasarana dan Sarana Konektivitas wilayah termasuk penataan kawasan pemukiman dan perumahan.

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas perhubungan transportasi dan logistik daerah termasuk di wilayah gerbang pembangunan negeri.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJM
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penurunan kecelakaan angkutan umum darat/laut	n/a	n/a	n/a	n/a	20	30	40
2.	Persentase desa yang terlayani angkutan umum layak jalan/layar	23	29	36	45	50	56	56
3.	Jumlah Steiger/Pelabuhan laut/ udara/ Terminal	86	88	90	92	94	96	98
4.	Persentase peningkatan arus penumpang dan barang antar wilayah	n/a	n/a	n/a	n/a	2	4	5
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	n/a	n/a	65	70	80	82	82
6.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Cc	Cc	CC	B	B	BB	BB
7.	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK	100	100	100	100	100	100	100


## BAB VIII PENUTUP

Program yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, karena RPJMD memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan renstra Perangkat Daerah, pada ayat (2) disebutkan Rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Bengkalis, Juli 2019

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bengkalis



**DJOKO EDY IMHAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680329 199002 1 001